

THE INFLUENCE OF TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, COMMUNITY PARTICIPATION ON VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN KALIGREJENG VILLAGE, WONOTIRTO SUB-DISTRICT, BLITAR DISTRICT

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA KALIGREJENG KECAMATAN WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR

Shinta Dayang Nabilla¹, Faizal Satria Desitama²

UIN SATU Tulungagung^{1,2}

Shintadayang99@gmail.com¹, faizalsatria6@uinsatu.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of transparency, accountability, community participation on village financial management in Kaligrenjeng Village, Wonotirto District, Blitar Regency. This type of research is quantitative research using primary and secondary data by distributing questionnaires to respondents. The population in this study are village officials and the local community. The sample selection method used purposive sampling to get 97. The data analysis method used multiple linear regression analysis and tested the validity and reliability of the quality of the questionnaire with the SPSS version 26 application. The results showed that partially the transparency variable had a significant effect on financial management with a significance of 0.000 and tcount 4.106. Partially the accountability variable has a significant effect on financial management with a significance of 0.000 and tcount 5.614. Partially, the community participation variable has a significant effect on financial management with a significance of 0.16 and a tcount of 2.449. Conclusion, transparency and accountability and community participation partially affect the management. Simultaneously, transparency, accountability and community participation have an impact on village financial management.

Keywords: *Transparency, Accountability, Community Participation, Village Financial Management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di desa Kaligrenjeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat setempat. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga mendapatkan 97. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan menguji validitas dan reabilitas kualitas kuesioner dengan aplikasi SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan, secara parsial variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dengan signifikansi sebesar 0.000 dan t_{hitung} 4.106. Secara parsial variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dengan signifikansi sebesar 0.000 dan t_{hitung} 5.614. Secara parsial variabel Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dengan signifikansi sebesar 0.16 dan t_{hitung} sebesar 2.449. Kesimpulan, transparansi dan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan. Adapun secara simultan

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Keuangan Desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit organisasi pemerintah yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. (Herianti & Arifin, 2018). Keuangan Desa dialokasikan ke desa oleh pemerintah, alokasi keuangan desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis, perhitungan dibagi secara merata setiap desa, disisi lain indeks kemahalan biaya konstruksi menunjukkan tingkat kesulitan geografis. Pengelolaan keuangan desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah. Keuangan desa masing-masing kabupaten/kota diatur dengan peraturan presiden mengenai rincian APBN. Oleh karena itu, besaran keuangan desa setiap desa akan bervariasi dari desa ke desa sesuai dengan indikator yang ada dan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam peraturan kabupaten/kota. (Raharjo, 2020)

Dengan adanya anggaran keuangan desa yang direalisasikan pada pemerintah desa diharapkan mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai pembangunan desa yang maju bagi kesejahteraan masyarakat desa. Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa keuangan desa tidak sepenuhnya untuk

program pemerintah, tetap juga banyak penyelewengan anggaran desa untuk kepentingan pribadi. Menurut Kapolres Blitar Kota AKBP Argowiyono kasus korupsi anggaran desa terjadi saat desa Tuliskriyo telah menerima pagu anggaran dana desa (ADD) 2018 dari pemerintah pusat senilai Rp 797.107.400 yang dikirim ke kas desa. Dana telah diberikan dalam dua tahap yaitu April dan Juni. Anggaran tersebut yang direalisasikan oleh tersangka sesuai APBDes hanya tahap 1 saja yaitu sebesar Rp 307.507.250 dan sisa anggaran sebesar Rp 489.600.150 pada tahap 2 oleh tersangka tidak direalisasikan sesuai APBDes. Sementara itu tersangka telah mengaku uang tersebut digunakan untuk menutupi ADD tahun 2017 atas perintah kepala desa, dan juga untuk membayar hutang (<https://www.beritasatu.com>).

Banyaknya kasus penyimpangan keuangan desa menuntun pemerintah untuk melakukan pembenahan, baik pembenahan aparatur desa maupun penerapan prinsip-prinsip manajemen publik yang.

Tabel 1. Daftar Rekapitulasi Laporan Realisasi APBDes Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Jumlah Pendapatan (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Pembayaran (Rp)		Surplus/ Defisit (Rp)	Pembayaran Netto (Rp)	Saldo Netto/(Silpa) Tahun Berjalan (Rp)
			Penerimaan Pembayaran	Pengeluaran Pembayaran			
1	6	12	13	14	15 = 6-12	16 = 13-14	17 = 15 + 16
2017							
2018	1.274.443.896,74	1.422.851.315,24	92.499.077,00	-	-47.007.418,20	92.499.077,00	92.499.077,00
2019	1.469.181.981,21	1.181.662.699,39	43.088.438,30	-	86.303.281,86	43.088.438,30	135.582.518,86
2020	1.311.393.212,71	1.168.132.705,91	131.393.722,36	20.000.000,00	43.618.641,80	131.393.722,36	179.201.160,16
2021	1.518.736.674,73	1.443.010.769,44	132.932.368,16	20.000.000,00	15.203.311,68	132.932.368,16	194.403.471,84
2022	1.548.773.646,47	1.667.310.414,00	133.015.536,24	-	-58.536.267,53	133.015.536,24	94.478.711,60
2023	1.246.246.880,00	-	91.478.771,69	-	1.246.246.880,00	91.478.771,69	1.631.022.651,69

Desa yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Kaligrenjeng yang terletak di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar dan memiliki dana desa pada tahun 2018-2022 tersebut, dimana dana ini memerlukan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui pendapat atau pemikiran masyarakat setempat tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan desa di desa Kaligrenjeng. Apabila pendapat atau gagasan tentang kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan transparansi keuangan dengan baik, maka tugas perangkat desa terpenuhi sesuai dengan tanggung jawabnya, atau sebaliknya jika peranan perangkat desa belum memenuhi persyaratan yang diharapkan masyarakat sekitar maka tugas perangkat desa tidak memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa di desa Kaligrenjeng.

Fenomena masalah yang ditemui pada tahap pertama survey di Desa Kaligrenjeng adalah belum adanya fasilitas informasi di Desa Kaligrenjeng untuk memberikan informasi tentang kas masuk dan kas keluar serta tentang kegiatan yang berlangsung di desa tersebut dalam pengalokasikan keuangan desa. Dalam penelusuran awal oleh peneliti Desa Kaligrenjeng telah membuat papan informasi (baliho) sebagai media informasi bagi masyarakat namun, baliho tidak dapat bertahan lama sampai akhir tahun karena faktor alam. Sehingga masyarakat tidak dapat melihat laporan pertanggungjawaban yang di sediakan oleh desa sampai akhir tahun, dan pihak desa tidak memperbarui media informasi (baliho) tersebut. Pada desa tersebut juga belum terdapat media informasi secara online (website) yang diperlukan untuk mengakses anggaran sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi. Dari segi kualitas perangkat desa saat ini sebagian besar diukur dari tingkat pendidikan yang mayoritas tamat SMA/SMK dan hanya sebagian kecil yang masuk perguruan tinggi. Untuk ketrampilan masih banyak perangkat desa yang belum memiliki ketrampilan komputer atau teknologi informasi.

Penelitian terdahulu yang serupa

dengan penelitian ini yaitu yang dilakukan Anita Firdaus, Suharno dan Sunarti (2019) berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa Sidoharjo. Penelitian lain dilakukan Marhaendra, Endah dan Astrini (2022) yang berjudul “Pengaruh transparansi Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa”.

Hasil analisis penelitian ini membuktikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Nganjuk. Penelitian lain yang dilakukan Emilianus (2019) yang berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur). Hasil penelitian ini yaitu transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan pada pembedayaan masyarakat, sedangkan akuntabilitas tidak berpengaruh pada pemberdayaan masyarakat. Penelitian lain yang dilakukan Ade, I Wayan dan I Putu (2021) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Hasil penelitian ini adalah akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat sedangkan transparansi dan partisipasi masyarakat

berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Kajian Teori

Teori Stewardsip

Teory Stewardship menunjukkan bahwa tidak ada situasi dimana manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu tetapi terfokus tujuan utama yaitu kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Asumsi filosofi teori stewardship didasarkan pada sifat manusia untuk dapat dipercaya, bertindak secara bertanggungjawab, memiliki intergritas dan jujur kepada orang lain. dengan kata lain teory stewardship mengasumsikan bahwa manajemen dapat bertindak baik untuk kepentingan publik pada umumnya maupun shareholders pada khususnya (Daniri, 2005). Implikasi teori stewardship dalam penelitian ini adalah dapat menjelaskan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan pelayanan baik untuk publik, mampu mempertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah, sehingga dapat mencapai tujuan ekonomi dan mencapai kesejahteraan masyarakat secara maksimal. (Raja, 2021)

Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin setiap orang bebas mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu tentang informasi kebijakan, proses pembuatan kebijakan dan hasil yang dicapai (Loina, 2003).

Indikator transparansi meliputi 1. Informatif yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta bagi pemangku kepentingan (stakeholders) yang membutuhkan informasi yang jelas dan akurat. 2. Keterbukaan yaitu

keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk menerima informasi sehingga semua informasi publik harus terbuka dan dapat diakses bagi semua pengguna informasi publik kecuali dari informasi yang dikecualikan yang diatur dengan undang-undang. 3. pengungkapan yaitu mengungkapkan atau menginformasikan kepada publik tentang kegiatan dan kinerja finansial. (Mardiasmo, 2009).

Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009), Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau menerangkan kinerja dan perilaku seseorang pimpinan dalam unit organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk menuntut pertanggungjawaban. Akuntabilitas memiliki sifat yang konkret tidak abstrak dan harus ditetapkan oleh hukum melalui serangkaian prosedur yang sangat spesifik tentang apa yang harus dipertanggungjawabkan.

Indikator akuntabilitas meliputi: 1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan akuntabilitas lembaga publik untuk berperilaku jujur dan menaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan tugas. 2. Akuntabilitas manajerial berkaitan dengan prosedur yang digunakan untuk melaksanakan tugas secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Akuntabilitas program yang terkait dengan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak. 4. Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan tanggungjawab lembaga publik atas kebijakan yang diambil. 5. Akuntabilitas finansial merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam

mencapai tujuan. (Mahmudi, 2013)

Partisipasi Masyarakat

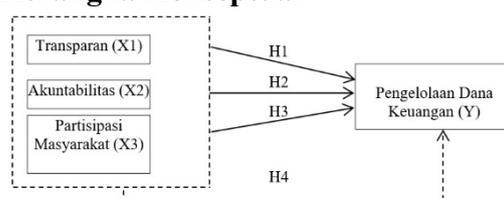
Menurut pendapat umum partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi dalam upaya pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat menyangkut semua aspek interaksi masyarakat dan pemerintah. Indikator partisipasi masyarakat meliputi: 1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. 2. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dari rencana yang telah disepakati bersama sebelumnya, yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. 3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat merupakan keberhasilan rencana yang dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan atau tidak. 4. Partisipasi dalam evaluasi terkait dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh yang bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. (Sholekan, 2014)

Keuangan Desa

Pengertian keuangan desa dalam undang-undang desa meliputi segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban menciptakan pengelolaan pendapatan, pengeluaran, pembiayaan dan keuangan desa. Keuangan desa dikelola dengan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilaksanakan secara tertib dan

disiplin anggaran. (Raharjo, 2020) Keuangan desa dapat dibedakan menjadi keuangan desa yang dikelola secara langsung berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Sedangkan, keuangan desa yang dikelola secara mandiri dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (Soleh & Rochmansjah, 2014)

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Variabel yang diuji adalah:

1. Dependent Variabel (Y) yakni variabel yang dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas (X), pengelolaan keuangan di Desa Kaligrenjeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar adalah variabel terikat pada penelitian ini.
2. Independent Variabel (X) yakni variabel yang menjelaskan dan mempengaruhi variabel Y. Variabel bebas penelitian ini adalah: X1: Transparansi, X2: Akuntabilitas, X3: Partisipasi Masyarakat

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa sebanyak 2.983. Sedangkan penarikan sampel yang dilakukan yakni menggunakan metode *purposive sampling*. Metode ini dipilih karena informan akan dipilih sesuai dengan kriteria tujuan penelitian. Sehingga sampel yang dipilih terdapat 97 responden yang terdiri dari Perangkat Desa (Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Perencanaan),

Tokoh Masyarakat (BPD 7 anggota, LPMD 7 anggota, BUMDes 6 anggota, Karang Taruna 10 anggota, PKK 24 responden, Ketua RT 30 responden dan Ketua RW 9 responden.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Variabel dalam sampel diukur dengan menggunakan data kuantitatif yang berupa angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Dan data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dengan cara melalui media perantara.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner atau angket dalam bentuk *google form*. Data tersebut disebar secara online sehingga tidak memerlukan kertas.

Teknik Skala Penelitian

Skala pengukuran yang dalam penelitian ini menggunakan skala likert ordinal. Skala likert dalam penelitian ini terdapat lima pilihan jawabannya dan tingkat penilaiannya sebagai berikut: Sangat Setuju (SS) = 5, Setuju (S) = 4, Netral (N) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2, Sangat Tidak Setuju (STS) = 1.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, data yang telah ada tersebut akan diolah menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versi 26. Uji instrumen penelitian juga dikenal sebagai uji validitas dan uji reliabilitas, uji instrumen asumsi klasik dikenal dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas, uji analisis regresi

linier berganda, uji hipotesis juga dikenal dengan koefisien determinasi (R^2), uji F (Simultan), uji t (Parsial), ialah teknik analisis yang diterapkan pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Uji Validitas

Tujuan uji validitas adalah untuk mengetahui apakah setiap pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner sesuai dengan variabelnya atau tidak. Metode yang digunakan adalah mengkorelasikan setiap item dengan skor total. Item dianggap valid jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dalam penelitian ini r tabel yaitu 0,1975 (r tabel dengan sampel 97 dan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%), sehingga item dikatakan valid jika nilai r hitung lebih dari 0,1975.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Transparansi (X1)

Variabel	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N	Keterangan
X1.1	0.767**	0,000	97	Valid
X1.2	0.536**	0,000	97	Valid
X1.3	0.488**	0,000	97	Valid
X1.4	0.767**	0,000	97	Valid
X1.5	0.370**	0,000	97	Valid

Sumber: *Output* SPSS 26, 2023

Hasil uji validitas variabel transparansi (X1) menunjukkan nilai r hitung untuk semua item lebih besar dari 0,1975 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel ini valid atau dapat digunakan untuk variabel transparansi.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (X2)

Variabel	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N	Keterangan
X2.1	0.361**	0,000	97	Valid
X2.2	0.506**	0,000	97	Valid
X2.3	0.483**	0,000	97	Valid
X2.4	0.401**	0,000	97	Valid
X2.5	0.529**	0,000	97	Valid

Sumber: *Output* SPSS 26, 2023

Hasil uji validitas variabel akuntabilitas (X2) menunjukkan nilai r hitung untuk semua item lebih besar dari

0,1975 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel ini valid atau dapat digunakan untuk variabel akuntabilitas.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat (X3)

Variabel	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N	Keterangan
X3.1	0.255**	0,012	97	Valid
X3.2	0.372**	0,000	97	Valid
X3.3	0.271**	0,007	97	Valid
X3.4	0.306**	0,002	97	Valid
X3.5	0.231**	0,055	97	Valid

Sumber: *Output SPSS 26, 2023*

Hasil uji validitas variabel partisipasi masyarakat (X3) menunjukkan nilai r hitung untuk semua item lebih besar dari 0,1975 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel ini valid atau dapat digunakan untuk variabel partisipasi masyarakat.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Pengelolaan Keuangan (Y)

Variabel	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	N	Keterangan
Y.1	0.617**	0,000	97	Valid
Y.2	0.505**	0,000	97	Valid
Y.3	0.440**	0,000	97	Valid
Y.4	0.617**	0,000	97	Valid
Y.5	0.480**	0,000	97	Valid

Sumber: *Output SPSS 26, 2023*

Hasil uji validitas variabel pengelolaan keuangan (X1) menunjukkan nilai r hitung untuk semua item lebih besar dari 0,1975 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel ini valid atau dapat digunakan untuk variabel pengelolaan keuangan.

Uji Reliabilitas

Uji realibilitas mengacu pada pengertian bahwa instrument yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi

yang sesungguhnya di lapangan. Variabel dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,60. Berikut adalah hasil uji reliabilitas tersebut

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Transparansi	0.786	Reliabel
Akuntabilitas	0.713	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0.720	Reliabel
Pengelolaan Keuangan	0.633	Reliabel

Sumber: *Output SPSS 26, 2023*

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dapat dilihat pada nilai *Cronbach's Alpha*. Nilai *Cronbach's Alpha* pada keseluruhan variabel yang ada lebih dari 0,60, maka kontruk pertanyaan adalah reliabel. Jadi dapat diartikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan.

Uji Normalitas

Uji normalitas dapat digunakan untuk menganalisis suatu data dan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, sehingga langkah selanjutnya tidak menyimpang dari kebenaran sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* untuk mengetahui apakah tingkat signifikansi data tersebut berdistribusi normal atau tidak.

Pengambilan keputusannya digunakan pedoman jika nilai Sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai Sig. > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Berikut adalah hasil uji normalitas dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.00000
	Std. Deviation	1.14273397
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.047
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: *Output SPSS 26, 2023*

Dari tabel hasil uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* diatas menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* tingkat signifikansi lebih besar dari tingkat 0,05 atau $0,200 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola distribusi residual terdistribusi normal, sehingga model regresi memenuhi uji normalitas.

Uji Multikolinieritas

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Transparansi	.872	1.146
Akuntabilitas	.743	1.345
Partisipasi Masyarakat	.708	1.413

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Sumber: *Output SPSS 26, 2023*

Berdasarkan tabel hasil uji multikolonieritas, nilai toleransi dari total keseluruhan variabel independen diatas 0,10 yang berarti tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal sama yaitu tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10,00. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas antar variabel independent dalam regresi.

Uji Hipotesis

Ada empat hipotesis dalam penelitian ini yang akan diuji dengan menggunakan uji signifikansi parameter individual (Uji t) dan juga uji signifikansi simultan (Uji F). Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen secara individual dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Uji statistik f adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji signifikansi f pada tingkat α yang digunakan dalam analisis hipotesis. Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara bersamaan (simultan).

Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji-T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1.987	1.886			1.054	.295
Transparansi	.289	.070	.306		4.106	.000
Akuntabilitas	.474	.084	.454		5.614	.000
Partisipasi Masyarakat	.188	.077	.203		2.449	.016

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Sumber: *Output SPSS 26, 2023*

a. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Berdasarkan hasil uji T Parsial dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} Transparansi sebesar 4.106 dengan taraf signifikansi probabilitas sebesar $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k-1 = 97-3-1 = 93$, maka perhitungan t_{tabel} didapatkan sebesar 1.98498, sehingga didapatkan hasil bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} atau $4.106 > 2.02108$. Kemudian jika dilihat dari nilai signifikansinya, nilai signifikansi Transparansi yaitu sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0,05 atau $0.000 < Sig. 0,05$. Berdasarkan hasil uji t menggunakan nilai t_{hitung} dan juga nilai sig. dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima dan H_0 ditolak. Sehingga secara parsial variabel Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan.

b. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil uji T Parsial dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} Akuntabilitas sebesar 5.614 dengan taraf signifikansi probabilitas sebesar $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k-1 = 97-3-1 = 93$, maka perhitungan t_{tabel} didapatkan sebesar 1.98498, sehingga didapatkan hasil bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} atau $5.614 > 1.98498$. Kemudian jika dilihat dari nilai signifikansinya, nilai signifikansi Akuntabilitas yaitu sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0,05 atau $0.000 < Sig. 0,05$. Berdasarkan hasil uji t menggunakan nilai t_{hitung} dan juga nilai sig. dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima dan H_0 ditolak. Sehingga secara parsial variabel Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan.

c. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil uji T Parsial dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} Partisipasi Masyarakat sebesar 2.449 dengan taraf signifikansi probabilitas sebesar $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k-1 = 97-3-1 = 93$, maka perhitungan t_{tabel} didapatkan sebesar 1.98498, sehingga didapatkan hasil bahwa nilai t_{hitung} lebih kecil dari pada t_{tabel} atau $2.449 < 1.98498$.

Kemudian jika dilihat dari nilai signifikansinya, nilai signifikansi Partisipasi Masyarakat yaitu sebesar 0.016 yang lebih kecil dari 0,05 atau $0.016 < Sig. 0,05$. Berdasarkan hasil uji t menggunakan nilai t_{hitung} dan juga nilai sig. dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima dan H_0 ditolak. Sehingga secara parsial variabel Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan.

Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji-F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	152.144	3	50.715	37.623	.000 ^b
	Residual	125.361	93	1.348		
	Total	277.505	96			

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

b. Predictors: (Constant), PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS

Sumber: *Output* SPSS 26, 2023

Berdasarkan hasil tabel uji F simultan menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikan yaitu $0.000 < 0.05$, dan nilai F_{hitung} sebesar 37.623 dengan $df(N1) = k-1 = 3-1 = 2$ dan $df(N2) = n-k = 97-3 = 94$, dimana diketahui perhitungan nilai F_{tabel} sebesar 3.09, maka nilai f_{hitung} lebih besar dari nilai f_{tabel} ($37.623 > 3.09$), yang berarti hipotesis keempat diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pengelolaan Keuangan.

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.740 ^a	.548	.543	1.161

a. Predictors: (Constant), PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS

Sumber: *Output* SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi, nilai R-squared sebesar 0.548. Berarti sebesar 54,8% variable independen dalam model yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat mampu mempengaruhi Pengelolaan Keuangan, dan sisanya sebesar 45,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk estimasi penelitian ini (*error term*).

Pembahasan

1. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pengelolaan

Kuangan Desa Di Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. Hal ini mengandung arti bahwa Transparansi dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan yang berarti setiap terjadi peningkatan variabel Transparansi, variabel Pengelolaan Keuangan akan mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship*, dimana aparatur memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk memberikan keterbukaan atau transparansi tentang apa yang telah dilakukan oleh aparatur. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Susanti Rahmah yang menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pengelolaan Keuangan. (Rahmah, 2019).

2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar yang berarti setiap terjadi peningkatan variabel Akuntabilitas, variabel Pengelolaan Keuangan akan mengalami peningkatan.. Hal ini mengandung arti bahwa Akuntabilitas dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai pengelolaan keuangan.

Adanya akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa pemerintah desa menerapkan peraturan yang telah diberikan dan program kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan, baik oleh pemerintah pusat maupun masyarakat. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka semakin optimal tingkat kualitas pengelolaan keuangan desa. (Rahmah, 2019). Hal ini sejalan dengan *stewardship theory*, *steward* memiliki tanggungjawab untuk melaporkan kepada publik tentang hasil kinerja atas program yang dilaksanakan. (Putri & Maryono, 2022). Akuntabilitas adalah bentuk tanggungjawab dari *steward* (aparatur desa) atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa kepada eksekutif di atasnya maupun kepada *principal* (masyarakat desa). Sehingga, jika masyarakat menilai penerapan prinsip akuntabilitas pada penyelenggaraan pemerintahan sudah cukup baik, maka pengelolaan dana desa-nya juga dianggap sudah baik dan optimal. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Elisa Rama Yanti, Wiralestari dan Wiwik Tiswiyanti yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. (Yanti, Wiralestari & Tiswiyanti, 2023).

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. Hal ini mengandung arti bahwa

Partisipasi Masyarakat dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *stewardship theory* menyatakan bahwa masyarakat sebagai principal merupakan tujuan utama adanya penyelenggaraan pemerintahan, untuk mewujudkan prioritas tujuan pemerintah secara optimal dibutuhkan partisipasi masyarakat yang dapat memberikan masukan, penilaian dan pengawasan pada kinerja aparat desa (*steward*). (Putri & Maryono, 2022) Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan partisipasinya dalam pengelolaan keuangan desa, dengan terlibatnya masyarakat secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa akan berdampak pada semakin tinggi efektivitas pengelolaan keuangan desa. (Juniarti, Inapty & Rakhmawati 2022). Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian Prihasantyo Siswo Nugroho, Panca Wahyuningsih, Siti Aliyah yang menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan Keuangan. (Nugroho, Wahyuningsih & Aliyah, 2022)

4. Pengaruh **Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar**

Hasil Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa Transparansi, Akuntabilitas dan

Partisipasi Masyarakat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi Struktur Modal. Untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang jelas dan optimal pada desa, maka diharuskan untuk mengoptimalkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti transparansi keuangan, akuntabilitas dan partisipasi dari masyarakat desa. Temuan penelitian ini didukung dengan penelitian Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani yang mengemukakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Keuangan. (Sukmawati & Nurfitriani, 2019). Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel meliputi Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniri, Achmad. (2005). *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. PT Triexs Trimacindo, Jakarta.
- Donaldson, L dan Davis. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Returns*. Australian Journal of Management, 16, 49-64.
- Fibrianto, Didik. 22, Maret, 2022. *Buron 2 Tahun, Bendahara Korupsi Dana Desa Diringkus Polisi di Blitar*. (<https://www.beritasatu.com>)
- Firdaus, Anita, Suharno & Sunarti. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten*

- Sragen. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15, 3. 291-300.
- Herianti & Arifin. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam. *Jurnal Al-Tsarwah*, 3,1. 21-42
- Jaa, Emilianus. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7,1. 1-9.
- Juniarti, Ulvia, Inapty, Biana A & Rakhmawati, Intan. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Risma*. 2,3. 608-620
- Loina, Lalolo Krina. (2003). Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance. *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta, Jakarta*.
- Mahmudi. (2013). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Nugroho, W & Alliyah. (2022). "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada 10 Pemerintahan Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)". *Jurnal. Akuntansi dan Pajak*, 23,1. 1-9
- Pahlevi, M I, Susilowati, E & Widoretno, A A. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5,3. 1480-1485.
- Putri, Ade Ayu A, Sudiana, I Wayan dan P, I Putu Deddy S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Jurnal Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2,2. 258-280
- Putri, Aulia Rakhma L dan Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*. 4,3.1668-1688
- Raharjo, Muhamad Muiz. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. PT Bumi Aksar, Jakarta.
- Rahmah, Siti Susanti. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir). *JOM FEB*, 6,1. 1-12
- Raja, Tubagus Senopati M&Amanah, L. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Pemerintahan: *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10, 3. 1-18
- Sholekan, Mochamad. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan*

Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Rosdakarya. Jogjakarta.

Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. (2014). *Pengelola Keuangan Desa.* Fokusmedia, Bandung.

Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan ADD di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Universitas Diponegoro. Semarang.*

Sukmawati, Fitri dan Alfi Nurfitriani. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM*, 2,1. 52-66